

**DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI
KARESIDENAN PATI TAHUN 2007-2018**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis**

Oleh:

ARISANDY DWI NUGRAHENI

B300160165

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI
KARESIDENAN PATI TAHUN 2007-2018**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

ARISANDY DWI NUGRAHENI

B300160165

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Muhammad Anas, S.E., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN

**DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI
KARESIDENAN PATI TAHUN 2007-2018**

OLEH

ARISANDY DWI NUGRAHANI

B300160165

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 19 Desember 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Muhammad Anas, S.E., M.Si.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Yuni Prihadi Utomo, S.E., M.M.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Siti Fatimah N, S.E., M.Si

(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()



D. Samsudin, M.M.
NIDN. 0017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 19 Desember 2020

Penulis



ARISANDY DWI NUGRAHENI

B300160165

DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KARESIDENAN PATI TAHUN 2007-2018

Abstrak

Masalah pembangunan sumber daya manusia merupakan masalah yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti kesejahteraan dan kebahagiaan. Pembangunan sumber daya manusia di Karesidenan Pati yang cenderung lambat menyebabkan masyarakat tidak dapat menikmati umur panjang, hidup sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan angka partisipasi murni terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Karesidenan Pati selama kurun waktu 2008-2018 dengan menggunakan alat analisis regresi data panel *fixed effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan angka partisipasi murni berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditemukan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Saran kebijakan bagi masing-masing pemerintah daerah di Karesidenan Pati adalah merealisasikan kebijakan perlindungan sosial yang tepat sasaran dan memberikan efek ganda terhadap pembangunan. Efek ganda yang dimaksud adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya IPM.

Kata kunci: modal manusia, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, regresi data panel

Abstract

The problem of human resource development is a complex problem because it involves various aspects such as welfare and happiness. Development of human resources in the Pati Residency which tends to be slow causes the community to be unable to enjoy a long life, healthy and carry out the productive life. The research aimed to estimate the effect of the level of poverty, unemployment rate, and net enrollment rate on the Human Development Index (HDI) in Pati Residence during the periode of 2008-2018 using a fixed effect panel data regression model. The result of this study showed that the level of poverty the net enrollment rate had a positive effect on the HDI. Meanwhile, the unemployment rate was found to have a negative effect on the HDI. The sugestion for the regional governments in the Pati Residency is to realize a social protection that is right on target and has dual effect on development. The dual effect referred to is a reduction in the number of poor people and an increase in the HDI.

Key words : human capital, poverty, unemployment, education, panel data regression

1. PENDAHULUAN

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan perbaikan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam sehingga menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolok ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan. Namun demikian, keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial (Mirza, 2012).

IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM merupakan alat kebijakan yang merupakan hasil komprehensif dari berbagai faktor. IPM hadir sebagai alat ukur yang mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan secara menyeluruh karena dapat menggambarkan faktor ekonomi dan non-ekonomi (Latuconsina, 2017).

Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya melihat berapa besar tingkat PDRB saja, tetapi juga melihat sejauh mana pembangunan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yang menunjukkan kondisi yang sejahtera. Salah satu bentuk keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tingkat pembangunan manusia suatu daerah. Karesidenan Pati sebagai daerah pesisir pantai utara Pulau Jawa memiliki nilai IPM yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Jawa Tengah. Perbandingan peringkat IPM antardaerah di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2007 sampai 2018 memperlihatkan bahwa daerah-daerah di Karesidenan Pati mengalami ketertinggalan dalam pembangunan sumber daya manusianya.

IPM di Karesidenan Pati walaupun meningkat, tapi peningkatannya cenderung rendah dan belum mencapai level tinggi. IPM tertinggi di Karesidenan Pati adalah pada tahun 2009 sebesar 71,886 poin, sedangkan IPM terendah adalah pada tahun 2010 sebesar 65,732 poin. Pada tahun 2011 hingga 2017 IPM di Karesidenan Pati selalu mengalami peningkatan walaupun hanya sedikit. Dalam peningkatan tersebut IPM mencapai angka 70,816 persen di tahun 2018. Peningkatan IPM di Karesidenan Pati mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Karesidenan Pati sehingga terjadi perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi IPM adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi penghalang bagi penduduk untuk mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan. Todaro dan Smith (2015) dalam teori modal manusia (*human capital*) menyatakan bahwa penduduk yang tidak mampu mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan akan memiliki keterampilan yang rendah sehingga menurunkan produktivitasnya sebagai tenaga kerja. Hal tersebut menjadi mata rantai kemiskinan yang tidak mudah untuk diuraikan (*vicious circle of poverty*).

Jumlah penduduk miskin di Karesidenan Pati mengalami penurunan selama kurun waktu 2007-2018. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut menandakan bahwa semakin banyak penduduk yang hidup di atas garis kemiskinan baik makanan maupun non-makanan. Namun, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut belum sepenuhnya mengurangi masalah kemiskinan di Karesidenan Pati. Selama kurun waktu 2007-2018 persentase jumlah penduduk miskin di Karesidenan Pati masih terbilang tinggi yaitu di atas 10 persen per tahun. Hal tersebut mencerminkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah daerah di Karesidenan Pati belum dijalankan dengan maksimal sehingga masih terdapat penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan sulit mencapai kesejahteraan ekonomi.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi IPM adalah angka partisipasi murni. Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam memperoleh dan menggunakan informasi dan memperoleh pemahaman akan perekonomian serta memberikan pilihan apakah seseorang ingin menjadi konsumen, produsen,

atau menjadi warga negara biasa. Secara tidak langsung pendidikan juga berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan pribadi seseorang dengan cara meningkatkan produktivitas sehingga akan mencapai standar hidup yang lebih baik (Zuhairoh dan Melailani, 2018). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan seseorang adalah angka partisipasi murni atau APM. APM mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu.

Rata-rata nilai APM di Karesidenan Pati mengalami penurunan dari tahun 2008-2011. Hal ini berarti masih banyak penduduk usia 7-18 tahun di Karesidenan Pati yang belum bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya. Dampak dari rendahnya nilai APM adalah menurunnya keterampilan dan daya saing penduduk, sehingga produktivitas penduduk sebagai tenaga kerja juga akan menurun. Apabila produktivitas menurun, maka penduduk akan sulit terserap oleh pasar kerja, sehingga pada akhirnya akan menjadi pengangguran.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi IPM adalah tingkat pengangguran terbuka, yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Secara ekonomi pengangguran dianggap sebagai *job loss* atau hilangnya sumber pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga (Mankiw, 2010). Hal ini akan berpengaruh terhadap IPM karena rumah tangga yang tidak mempunyai pendapatan maka tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Tingkat pengangguran terbuka di Karesidenan Pati mengalami fluktuasi dan masih tergolong tinggi. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2011 sejumlah 7,818 pesen. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Karesidenan Pati menandakan bahwa masih banyak angkatan kerja di Karesidenan Pati yang masih menganggur atau tidak mendapatkan pekerjaan sehingga tidak mempunyai pendapatan. Pendapatan masyarakat berkurang sehingga daya beli masyarakat menurun. Selain itu, pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia juga tidak

dapat tercukupi. Penganggur juga tidak dapat menikmati kehidupan yang layak pula, sehingga kesejahteraan penganggur tidak terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, dapat disimpulkan bahwa IPM di Karesidenan Pati masih berada pada level sedang. Hal ini disebabkan oleh pengangguran dan jumlah orang miskin di Karesidenan Pati yang masih relatif tinggi dan juga masih banyaknya anak yang tidak bersekolah. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh jumlah penduduk miskin, angka partisipasi murni, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Karesidenan Pati tahun 2008-2017.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data panel, yaitu kombinasi dari data *cross-section* dan *time series*. Data *cross-section* dalam penelitian ini meliputi lima kabupaten di Karesidenan Pati, antara lain Blora, Rembang, Pati, Kudus, dan Jepara ($i = 5$). Sementara itu, data *time series*-nya dimulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2018, dengan tahun 2016 tidak disertakan karena data tingkat pengangguran terbuka tidak tersedia pada publikasi BPS ($t = 11$). Dengan demikian, jumlah sampel data secara keseluruhan adalah 55 data (11×5).

Data dalam penelitian ini berupa data (i) data IPM; (ii) data jumlah penduduk miskin; (iii) data angka partisipasi murni; dan (iv) data tingkat pengangguran terbuka. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Metode analisa data penelitian ini menggunakan uji analisa regresi data panel dengan persamaan:

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 JPM_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 APM_{it} + u_{it} \quad (1)$$

di mana:

IPM	=	Indeks Pembangunan Manusia
JPM	=	Jumlah Penduduk Miskin
APM	=	Angka Partisipasi Murni
TPT	=	Tingkat Pengangguran Terbuka
β_0	=	konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	koefisien regresi variabel independen
i	=	kabupaten ke i
t	=	tahun ke t
u	=	unsur kesalahan (<i>error term</i>)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Data Panel *Cross-Section*

Variabel	Konstanta		
	PLS	FEM	REM
C	67,829	47,185	62,550
JPM	-0,022	0,080	0,017
APM	0,047	0,205	0,082
TPT	0,074	-0,514	-0,280
R ²	0,087	0,619	0,074
Adj. R ²	0,033	0,562	0,019
F-statistik	1,611	10,893	1,355
Prob. F-statistik	0,198	0,000	0,267

3.2 Pemilihan Model Estimasi Terbaik

3.2.1 Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	16,395	(4, 47)	0,000

Tabel 2 memperlihatkan bahwa probabilitas F-statistik uji Chow bernilai sebesar 0,000 ($< 0,01$), sehingga H_0 ditolak. Kesimpulannya adalah model berdasarkan pendekatan *Fixed Effects Model* (FEM).

3.2.2 Uji Hausman

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Square Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section random	31,193	3	0,000

Tabel 3 menunjukkan bahwa probabilitas χ^2 -statistik uji Hausman bernilai sebesar 0,000 ($< 0,01$), sehingga H_0 ditolak. Kesimpulannya adalah model berdasarkan pendekatan *Fixed Effects Model* (FEM).

Tabel 4. Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Pendekatan FEM

$\overline{IPM}_{it} = 47,185 + 0,080 JPM_{it} + 0,205 APM_{it} - 0,514 TPT_{it}$			
	(0,000)	(0,000)*	(0,007)*
			(0,008)*
$R^2 = 0,619$; DW-Stat = 1,768; F-Stat = 10,893; Prob. F-Stat = 0,000			
Sumber: Lampiran 2; Keterangan: *Signifikan pada $\alpha = 0,01$; Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai t-statistik			

Tabel 5. Efek dan Konstanta FEM

No	Kabupaten	Efek	Konstanta
1	Kabupaten Blora	-3,495	43,691
2	Kabupaten Rembang	-2,114	45,071
3	Kabupaten Pati	-3,324	43,861
4	Kabupaten Kudus	6,935	54,120
5	Kabupaten Jepara	1,998	49,183

3.3 Uji Signifikansi Parsial

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi Parsial

Variabel	Probabilitas t-Statistik	Kriteria	Kesimpulan
JPM	0,000	< 0,01	Signifikan pada $\alpha = 0,01$
APM	0,007	< 0,01	Signifikan pada $\alpha = 0,01$
TPT	0,008	< 0,01	Signifikan pada $\alpha = 0,01$

Berdasarkan Tabel 6, terlihat bahwa variabel jumlah penduduk miskin, angka partisipasi murni, dan tingkat pengangguran terbuka masing-masing memiliki nilai probabilitas t-statistik kurang dari 0,01. Dengan demikian, masing-masing dari variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM di Karesidenan Pati selama kurun waktu 2007-2018.

3.4 Uji Signifikansi Simultan

Tabel 4 memperlihatkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000 (< 0,01) yang berarti H_0 ditolak. Kesimpulannya adalah model yang dipakai eksis atau secara bersama-sama jumlah penduduk miskin, angka partisipasi murni, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap IPM di Karesidenan Pati selama kurun waktu 2007-2018.

3.5 Interpretasi Koefisien Determinasi

Tabel 4 memperlihatkan bahwa nilai R^2 adalah sebesar $0,619 \approx 0,62$. Nilai tersebut memiliki arti bahwa 62 persen variasi perubahan IPM dipengaruhi oleh variasi

perubahan jumlah penduduk miskin, angka partisipasi murni, dan tingkat pengangguran terbuka. Sisanya, yaitu sebesar 38 persen dipengaruhi oleh variasi perubahan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

3.6 Interpretasi Pengaruh Variabel Independen

- a. Variabel jumlah penduduk miskin diketahui memiliki koefisien regresi sebesar 0,080. Pola hubungan antara IPM dan jumlah penduduk miskin adalah linier-linier, sehingga apabila jumlah penduduk miskin naik sebesar 1 ribu jiwa maka IPM akan naik juga sebesar 0,080. Sebaliknya, apabila jumlah penduduk miskin turun sebesar 1 ribu jiwa maka IPM akan turun sebesar 0,080.
- b. Variabel angka partisipasi murni diketahui memiliki koefisien regresi sebesar 0,205. Pola hubungan antara IPM dan angka partisipasi murni adalah linier-linier, sehingga apabila angka partisipasi murni naik sebesar 1 persen maka IPM akan naik
- c. sebesar 0,205. Sebaliknya, apabila angka partisipasi murni turun sebesar 1 persen maka IPM akan turun sebesar 0,205.
- d. Variabel tingkat pengangguran terbuka diketahui memiliki koefisien regresi sebesar -0,514. Pola hubungan antara IPM dan tingkat pengangguran terbuka adalah linier-linier, sehingga apabila tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1 persen maka IPM akan turun sebesar 0,514. Sebaliknya, apabila tingkat pengangguran terbuka turun sebesar 1 persen maka IPM akan naik sebesar 0,205.
- e. Tabel 4.9 memperlihatkan bahwa daerah dengan nilai konstanta tertinggi adalah Kabupaten Kudus, yaitu sebesar 54,120. Artinya, terkait pengaruh jumlah penduduk miskin, angka partisipasi murni, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap IPM selama kurun waktu 2007-2018, Kabupaten Kudus merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Karesidenan Pati. Sementara itu, daerah dengan nilai konstanta terendah adalah Kabupaten Blora, yaitu sebesar 43,691. Hal ini berarti terkait pengaruh jumlah penduduk miskin, angka partisipasi murni, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap IPM selama kurun waktu 2007-2018, Kabupaten Blora

merupakan yang terendah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Karesidenan Pati.

3.7 Interpretasi Ekonomi

3.7.1 Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial, terbukti bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh positif terhadap IPM di Karesidenan Pati selama kurun waktu 2007-2018. Artinya, apabila jumlah penduduk miskin meningkat maka IPM akan meningkat. Hal ini dikarenakan walaupun penduduk miskin di Karesidenan Pati jumlahnya semakin menurun, namun kenaikan komponen masing-masing IPM sangat kecil atau bahkan mengalami penurunan. Data jumlah penduduk miskin dan komponen IPM ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 7 di bawah memperlihatkan bahwa rata-rata jumlah penduduk miskin di Karesidenan Pati mengalami penurunan selama kurun waktu 2011-2018. Selain itu, Tabel 7 juga memperlihatkan adanya peningkatan rata-rata indeks masing-masing komponen IPM di Karesidenan Pati secara aktual, namun secara kenaikan menunjukkan adanya fluktuasi. Apabila dilihat dari sisi kenaikan masing-masing komponen IPM di Karesidenan Pati, penurunan jumlah penduduk miskin tidak serta merta setiap tahunnya diikuti dengan peningkatan pertumbuhan komponen IPM. Sebagai contoh, pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Karesidenan Pati menurun dari yang semula berjumlah 587 ribu jiwa menjadi 550 ribu jiwa, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut juga diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat di Karesidenan Pati secara aktual, yaitu dari 0,547 menjadi 0,559. Namun penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 justru diikuti dengan penurunan pertumbuhan komponen kualitas pendidikan masyarakat di Karesidenan Pati yang semula tumbuh 2,473 persen turun menjadi 2,050 persen.

Tabel 7. Perbandingan Rata-Rata Jumlah Penduduk Miskin dengan Rata-Rata Masing-Masing Komponen IPM di Karesidenan Pati Tahun 2011-2018

Tahun	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Indeks Pendidikan		Indeks Kesehatan		Indeks Pengeluaran	
		Aktual	Kenaikan (Persen)	Aktual	Kenaikan (Persen)	Aktual	Kenaikan (Persen)
2011	127,460	0,524	1,876	0,846	0,087	0,665	1,524
2012	117,920	0,534	2,014	0,846	0,091	0,671	0,966

2013	117,340	0,547	2,473	0,847	0,095	0,675	0,591
2014	110,080	0,559	2,050	0,848	0,047	0,676	0,102
2015	109,180	0,572	2,353	0,848	0,094	0,682	0,899
2016	107,620	0,575	0,542	0,849	0,065	0,688	0,929
2017	106,440	0,587	2,146	0,850	0,105	0,695	1,016
2018	94,060	0,591	0,649	0,851	0,141	0,707	1,686

Walaupun program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa berjalan dengan baik, namun efek yang dihasilkan dari kebijakan tersebut tidak serta merta dapat memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak masyarakat. Efek kebijakan pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah terkadang hanya sedikit berdampak pada perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, atau bahkan lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian Mirza (2012) yang menemukan bahwa adanya pengaruh negatif jumlah penduduk miskin terhadap IPM Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2006-2009. Hal ini disebabkan karena penduduk yang terjerat dalam kemiskinan akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga penduduk miskin cenderung memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah.

3.7.2 Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) diketahui berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di Karesidenan Pati selama kurun waktu 2007-2018. Artinya, apabila APM meningkat maka IPM juga akan meningkat. Secara praktis, APM adalah proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Artinya, semakin tinggi nilai APM maka kualitas pendidikan akan juga akan semakin baik.

Sesuai dengan teori modal manusia (*human capital*) pendidikan adalah faktor terbesar yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Seseorang dengan pendidikan tinggi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam hidupnya dibanding orang dengan pendidikan yang lebih rendah, misalnya

di bidang pekerjaan. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan mendorong perbaikan di bidang lain seperti tingkat kesehatan yang lebih baik dan kesejahteraan secara ekonomi (Todaro dan Smith, 2015).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Hasbullah et al. (2012) yang juga menemukan adanya pengaruh positif angka partisipasi murni terhadap IPM di Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 2006–2010. Selain itu, Safitri et al. (2020) juga menemukan bahwa angka partisipasi sekolah jenjang SMA/MA berpengaruh positif signifikan terhadap IPM pada masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2017. Pengaruh positif tingkat pendidikan terhadap IPM di Indonesia dan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut menunjukkan bahwa peran pendidikan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan keterampilan penduduk, sehingga produktivitas penduduk sebagai tenaga kerjapun juga akan meningkat. Penduduk dengan produktivitas yang tinggi akan mudah terserap oleh pasar tenaga kerja, sehingga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk.

3.7.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM di Karesidenan Pati selama kurun waktu 2007-2018. Artinya, apabila tingkat pengangguran terbuka meningkat maka IPM akan menurun. Hal ini dikarenakan tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu indikator ekonomi yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dalam penghitungan IPM. Secara ekonomi, meningkatnya jumlah pengangguran akan berakibat pada hilangnya sumber pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga. Pada akhirnya, hal ini akan mengakibatkan menurunnya pengeluaran dan tingkat kesejahteraan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Noviatamara et al. (2019) yang juga menemukan pengaruh negatif tingkat pengangguran terbuka terhadap IPM di provinsi D.I Yogyakarta selama kurun waktu 2011-2017. Selain itu, Baeti (2013) juga menemukan bahwa meningkatnya jumlah pengangguran akan berdampak pada menurunnya IPM di provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2007-2011. Pengaruh negatif tingkat pengangguran terbuka terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta membuktikan bahwa tingginya tingkat pengangguran

dapat menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pengangguran menyebabkan hilangnya sumber pendapatan masyarakat, sehingga pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhanpun juga mengalami penurunan. Hal ini tentunya akan memperburuk kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa:

Berdasarkan hasil pemilihan model estimasi terbaik, uji Hausman menyimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil uji validitas pengaruh (uji t) pada *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin, angka partisipasi murni, dan tingkat pengangguran terbukasecara parsial berpengaruh terhadap IPM di Karesidenan Pati selama periode 2007-2018. Selain berpengaruh secara parsial, uji eksistensi model (uji F) menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut juga berpengaruh secara simultan (bersama-sama).

Jika dilihat dari efek yang terdapat pada *Fixed Effect Model*, diketahui bahwa Kabupaten Kudus memiliki nilai IPM tertinggi dibandingkan daerah-daerah lain di Karesidenan Pati. Hal tersebut seharusnya dapat memberikan motivasi bagi daerah-daerah lain agar mengembangkan kegiatan perekonomian dan perindustrian seperti Kabupaten Kudus sehingga berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 02(03), 85-98. Retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjI9qeCh5PsAhU263MBHb7eB7AQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fjournal.unnes.ac.id%2Fsju%2Findex.php%2Fedaj%2Farticle%2Fview%2F1984%2F1785&usg=AOvVaw2vU_OmLVRQGGP5_I3xI28V

- Hasbullah, Y., Fauzi, M., Fatimah, S., Yuniarti, T., & Syarifudin. (2012). Analisis Arah Kebijakan Ekonomi Terhadap Sektor Pendidikan dalam Peningkatan IPM. JEJAK : Journal of Economics and Policy, 05(02), 271-279. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/view/3907>
- Latuconsina, Z. M. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel. Journal of Regional and Rural Development Planning, 01(02), 202-216. Retrieved from <https://journal.ipb.ac.id/index.php/p2wd/article/view/17421>
- Mankiw, N. G. (2010). Macroeconomics. New York: Worth Publishers.
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah. JEJAK, 04(02), 102-113. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/474>
- Noviatamara, A., Ardina, T., & Amalia, N. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal REP : Riset Ekonomi Pembangunan, 04(01), 53-60. Retrieved from <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/1341>
- Safitri, L. D., Hermanto, E. M., & Indrasetianingsih, A. (2020). Pemodelan Indeks Pembangunan Manusia Dan Indeks Pembangunan Gender Di Indonesia Dengan Pendekatan Regresi Probit Biner Bivariat. Jurnal Matematika, Statistika, dan Komputasi, 16(02), 150-161. Retrieved from <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jmsk/article/view/7436>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economics Development 12th Edition. New Jersey: Pearson.
- Zuhairoh, Z. A., & Melaniani, S. (2018). Pengaruh Angka Kematian Bayi, Angka Partisipasi Murni, Rasio Ketergantungan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur. Jurnal Biometrika dan Kependudukan, 07(01), 87-95.